

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI DESA MALIWOWO
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

NURUL ULFA DILLA

Nomor Stambuk : 10564 11082 16



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI DESA MALIWOWO
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

NURUL ULFA DILLA

Nomor Stambuk : 10564 11082 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

15/03/2021

Prof. Dr. H. Alim

R/0018/IFM/21 CP

DIL

P

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Desa
Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu
Timur

Nama Mahasiswa : Nurul Ulfa Dilla

Nomor Stambuk : 105641108216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Hj. Hudi Setiawati, M.Si

Pembimbing II


Handam, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa, 23 Februari 2021.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI
3. Ahmad Taufiq, S.IP., M.AP

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Ulfa Dilla

Nomor Stambuk : 10564 11082 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 06 Januari 2021

Yang menyatakan,


Nurul Ulfa Dilla

ABSTRAK

Nurul Ulfa Dilla 2021. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Hj. Budi Setiawati dan Handam).

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Ketahanan bangsa dalam bencana merupakan kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari bencana alam yang terjadi. Pada prinsipnya, kinerja badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur senantiasa ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dengan tujuan memperbaiki permasalahan yang ada agar lebih maksimal.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari BPBD Kabupaten Luwu Timur, Camat Angkona, Kepala Desa Maliwowo dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga (3) indikator Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yaitu: pertama, pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen anggota yang bertugas di lapangan dan memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kedua, penguatan organisasi melalui BPBD Kabupaten Luwu Timur bekerja sesuai dengan arahan dan intruksi melalui standard operasional kerja dari lembaga yang telah dibentuk, sehingga tenaga lapangan memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas pengurangan resiko bencana. Ketiga, reformasi kelembagaan yaitu BPBD Kabupaten Luwu Timur menekankan kegiatan organisasi berbasis pendekatan teknologi modern dan informasi yang dapat diakses masyarakat juga sebagai langkah penentuan regulasi dari para pemangku kepentingan di desa Maliwowo Kecamatan Angkona.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Pemerintah Daerah dan Pengurangan Resiko Bencana

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Skripsi penelitian ini yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu bapak Ishak Jaya dan ibu Denny Alang yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ahmad Harakan S.IP., M.HI selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Handam, S.IP., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menapaki jenjang Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Kepala desa Maliwowo bapak Asdar dan masyarakat yang terdampak bencana longsor yang telah memberikan bantuan informasi mengenai bencana yang telah terjadi.
10. Kepada Eggie Rivalina Maghfira, S.IP dan A. Nawira, S.IP yang memberikan semangat dan turut membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada saudaraku Muhammad Ismet Al-Farabi dan Muhammad Wisnu Wirawan yang selalu memberi dukungan agar semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman kelas IP-B 2016 dan Angkatan MILITAN kalian luar biasa, para pejuang sarjana di tengah wabah Covid 19.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 06 Januari 2021

Penulis,



Nurul Ulfa Dilla



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMA TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Kerangka Teori	14
1. Konsep Pengembangan Kapasitas	14
2. Konsep Pemerintah Daerah	25
3. Konsep Pengurangan Resiko Bencana	27
C. Kerangka Pikir	34
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Objek Penelitian	43
B. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur	55
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	56
2. Penguatan Organisasi	70
3. Reformasi Kelembagaan	80
BAB V PENUTUP	90
1. Kesimpulan	90
2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1. Informan Penelitian	38
Tabel 4.1. Peralatan Penanggulangan Bencana	53
Tabel 4.2. Daftar Pegawai BPBD	57
Tabel 4.3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	58
Tabel 4.4. Rekonsiliasi Bencana Tanah Longsor	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Fikir	34
Gambar 4.1. DAS Kalaena Kabupaten Luwu Timur.....	46
Gambar 4.2. Matriks Tujuan, Sasaran dan Strategi/Kebijakan BPBD	73
Gambar 4.3. Pelatihan Gabungan Dengan PT. Vale dalam rangka penanggulangan Bencana	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan ancaman terbesar bagi umat kemanusiaan yang secara langsung dapat menggoyahkan dan menurunkan ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang terintegritas, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor alam dan faktor non alam maupun.

Paradigma penanggulangan bencana berubah dari *Fatalistic Responsive* yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respons akibat terjadinya bencana, menuju kepada *Proactive Preparedness*, penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial, yang menuntut pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Hal ini juga termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan meningkatkan

kesiapsiagaan terhadap peristiwa yang merugikan (UNISDR dalam Raja, Hendarmawan, & Sunardi, 2017).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sentral pada evakuasi dan proses analisis terhadap bencana sedangkan Dinas Sosial berperan pada penyediaan berbagai fasilitas pokok pasca bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa.

Munculnya berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan pelaksana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah menjadi pengungkit utama (*key leverage*) bagi upaya perwujudan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah berbentuk pembinaan dan fasilitasi pada 3 (tiga) aspek yakni kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, telah banyak program *Capacity Building* yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga donor internasional.

Paradigma bencana mengalami perubahan yaitu dari tanggap darurat (pra bencana) menjadi pengurangan risiko bencana. Untuk itu, unsur-unsur tahap tanggap darurat (pra bencana) perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan pada unsur pencegahan dan kesiapsiagaan. Pelaksanaan program

pencegahan dan kesiapsiagaan harus didasarkan pada kajian analisis mengenai ancaman yang dihadapi, tingkat kerentanan, kapasitas masyarakat serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun peralatan.

Menurut (Widiati, 2008) resiko bahaya dan kerugian dapat dikurangi dengan menerapkan manajemen risiko bencana, yang manfaatnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan. Warga masyarakat mempunyai peran penting dalam keadaan bencana belum terjadi, peran masyarakat sangat penting terutama dalam tahap mitigasi. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Ketahanan bangsa dalam bencana merupakan kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari bencana alam yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan manusia melalui pemberdayaan sehingga menjadi masyarakat tangguh bencana. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Apabila terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal atau paling tidak dengan cepat memulihkan diri

secara mandiri. Pada kenyataannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memiliki peta risiko bencana. Padahal adanya pemetaan risiko bencana menjadi sangat penting dalam penataan penanggulangan bencana yang matang, terarah dan terpadu (Nugraha, 2013).

Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah rawan terjadi bencana alam di Sulawesi Selatan. Pemerintah kabupaten Luwu Timur menghimbau kepada warga agar mengaktifkan komunikasi dari tingkat dusun hingga kabupaten. Semua pihak perlu bersinergi membangun komunikasi aktif hingga ke dusun. Menurut Husler selaku Bupati Luwu Timur dalam sosialisasi kepalangmerahan di Aula Dinas Pendidikan bahwa "Jika ada peristiwa atau kejadian bencana kita semua tanggap memberi informasi" (Ismar, 2018).

Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun 2016 Kabupaten Luwu Timur termasuk 146 daerah yang rawan bencana dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil kajian KRB, ada 12 jenis bencana alam, yaitu Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi. Selain itu, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung Dan Pemukiman, Epidemic dan Wabah Penyakit dan Kegagalan Teknologi. Namun, hanya potensi gunung berapi yang tidak terdapat di wilayah Kabupten Luwu Timur karena wilayah Luwu Timur tidak memiliki gunung yang aktif yang bisa menyebabkan potensi bencana gunung berapi hampir tidak ada.

Jika melihat bencana yang terjadi 5 tahun terakhir ini sejak tahun 2015 hingga sekarang bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur (Sumber BPBD Luwu Timur) :

1. Gempa Bumi

- a. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, di Kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah berdampak di kabupaten Luwu Timur. Gempa bumi tersebut menimbulkan kerusakan sebanyak lima rumah warga rusak parah, yang berada di desa Puncak Indah Kecamatan Malili.
- b. Gempa bumi berkekuatan 4,9 Skala richter terjadi pada hari senin tanggal 21 September 2020 di Sorowako dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tersebut termasuk dalam klasifikasi gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar matano.

2. Tanah Longsor

- a. Bencana longsor terjadi pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 05.30 wita, di dusun Harapan Makmur I desa Maliwowo kecamatan Angkona kabupaten Luwu Timur. Bencana longsor ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 7 luka berat dan 14 rumah tertimbun longsor. Longsor juga menutupi lalu lintas jalan trans Sulawesi – Tarengge Malili terputus akibat tertimbun material longsor.
- b. Pada tanggal 30 Maret 2020 longsor terjadi sekitar pukul 22.00 wita, di Desa Laskap, kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

yang mengakibatkan 1 unit rumah tertimbun longsor dan dua orang meninggal dunia.

3. Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, keberadaan DAS Kalaena dan DAS Larona di Kabupaten Luwu Timur membentuk sistem sungai yang berpotensi banjir pada musim hujan. Luapan air Sungai Kalaena dan Sungai Angkona menyebabkan banjir di wilayah bagian barat, meliputi Kec. Mangkutana, Kec. Kalaena, Kec. Tomoni Timur, Kec. Angkona, dan Kec. Wotu. Luapan air Sungai Larona dan Pongkeru menyebabkan banjir di wilayah Kec. Malili.

4. Angin Puting Beliung

- a. Pada tanggal 14 Januari 2019, di desa Manggala kecamatan Mangkutana mengakibatkan 6 rumah warga rusak parah.
- b. Pada tanggal 29 Januari 2019, di desa Pancakarsa dan desa Pattengko kecamatan Mangkutana mengakibatkan satu orang mengalami luka robek dibagian kepala.
- c. Pada tanggal 4 April 2020, di desa Tole Kecamatan Towuti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
- d. Pada tanggal 29 Oktober 2020, di kecamatan Mangkutana mengakibatkan satu rumah warga rusak.

5. Kebakaran

Pada tanggal 24 Oktober 2015, terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 537 hektar yang tersebar di enam titik yaitu, empat titik di kawasan

hutan lindung dan dua titik dikawasan hutan desa berada di Kecamatan Wasuponda, Malili, Tomoni, Angkona dan Towuti.

Dari semua jenis bencana yang terjadi dan telah dipaparkan diatas maka peneliti hanya memfokuskan pada bencana tanah longsor yang terjadi di desa Maliwowo Kecamatan Angkona. Bencana tanah longsor yang meyapu belasan rumah di Dusun Harapan Makmur, desa Maliwowo, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bencana terjadi sekitar pukul 06.00 Wita, Jumat (12/5/2017). Peristiwa ini menyebabkan tujuh warga Angkona meninggal dunia, sedangkan tujuh warga lainnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis (Abdurrahman, 2017).

Penyebab terjadinya longsor karena adanya pembukaan jalan pada wilayah-wilayah perbukitan yang ditemui disepanjang jalan di beberapa desa di Kecamatan Angkona yang dapat memicu ketidakstabilan lereng pada tebing-tebing lereng apabila jalan-jalan baru yang digunakan oleh aktivitas kendaraan dan juga adanya pemanfaatan lahan untuk kebun merica sehingga berpotensi meningkatkan pergerakan bencana tanah longsor terutama pada saat musim penghujan.

Melihat tingginya fenomena kejadian bencana di Kabupaten Luwu Timur khususnya kecamatan Angkona, perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar dengan merubah paradigma mengenai kebencanaan dari tanggap darurat menjadi paradigma pengelolaan dan pengurangan resiko bencana, yakni proaktif, terencana, desentralisasi, berbasis pengurangan resiko bencana, dan urusan bersama dengan masyarakat.

Pada prinsipnya, kinerja badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur senantiasa ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dengan tujuan memperbaiki permasalahan yang ada agar lebih maksimal, bencana yang terjadi di Desa Maliwowo merupakan salah satu bencana yang cukup parah yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur karena menelan korban dan merusak beberapa rumah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah agar bencana yang terjadi di Luwu Timur dapat diminimalisir melalui judul penelitian, "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan berguna sebagai kajian pengembangan ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Kesimpulan
1	(Sadat, 2016)	Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana, melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana merupakan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tanggung jawab baik Masyarakat

			yang terkena bencana.
2	(Rahman, 2017)	Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor	Hasil penilaian kapasitas Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan dalam 88 indikator mencapai 70,45%. Hasil persentase ini menjadikan kapasitas daerah Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori B, yang berarti kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik. Hal yang masih menjadi perhatian utama adalah mengurangi faktor – faktor resiko dasar yang menjadi prioritas ke-4. Pengurangan faktor-faktor resiko dasar ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai sosialisasi tentang bahaya pemukiman di daerah rawan bencana. Sosialisasi ini menjadi penting karena masih banyak pemukiman yang berada di daerah rawan dengan melihat peta rawan bencana. Perlu adanya kolaborasi dengan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah terbentuk pada masing-masing Desa Tangguh Bencana agar sosialisasi ini dapat berjalan efektif.
3	(Raja et al., 2017)	Upaya Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Ancaman Bencana Tanah Longsor (Desa Ndito Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Salah satu upaya pengurangan risiko bencana yang sangat penting yakni peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Desa Ndito merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana tanah longsor tinggi. Meskipun demikian, dampak risiko dapat diminimalis kesiapsiagaan, yang dinilai berdasarkan indikator tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan kesiapsiagaan melalui penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sudah cukup tinggi walaupun upaya

			pengurangan risiko bencana di daerah ini dinilai belum maksimal. Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, meskipun latar belakang pendidikan mayoritas penduduk hanya tingkat sekolah dasar, disebabkan oleh pengalaman menghadapi bencana tanah longsor yang terjadi akibat gempa di tahun 1992 dan ketika curah hujan tinggi di tahun 2012. Tingkat pengetahuan inilah yang membentuk baiknya sikap dan tindakan partisipasi masyarakat. Di lain sisi, tindakan kesiapan masyarakat dinilai belum baik karena rendahnya rata-rata pendapatan.
4 (Pucangan & Arimba wa, 2020)	Evaluasi Kapasitas Masyarakat Sebagai Desa Tangguh Bencana di Desa Lebih, Gianyar, Bali	Pengembangan Masyarakat	Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil akumulasi skoring tingkat ketangguhan terhadap bencana tsunami dan abrasi di Desa Lebih mencapai 2.6 yang berarti berada pada kategori "Desa Tangguh Bencana Madya", dan tingkat keberhasilan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana di Desa Lebih mencapai 2.9 yang berarti berada pada kategori "Berhasil".

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan ada beberapa perbedaan dan persamaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sebagai berikut :

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadat, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upaya pemerintah daerah (BPBD) dalam pengurangan resiko bencana.

Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sadat membahas tentang Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman, yaitu sama-sama membahas tentang penanggulangan bencana dan perbedaan antara keduanya terletak pada penelitian Rahman membahas tentang Kapasitas Daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.
3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Raja, yaitu sama-sama membahas tentang bencana longsor. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian Raja membahas tentang bagaimana kesiap-siagaan masyarakat terhadap ancaman bencana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang kapasitas pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dalam pengurangan resiko bencana.
4. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pucang, yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Pucang memfokuskan pada evaluasi

pengembangan kapasitas masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan ke pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana.

B. Konsep dan Kerangka Teori

1. Konsep Pengembangan Kapasitas

Menurut Milen (Prawitno & Alam, 2015) kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Morgan (Haryanto, 2014) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Bank Dunia (Haryanto, 2014) menekankan kapasitas ke dalam lima aspek, yaitu: (1) pengembangan SDM, training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis, (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen, (3) *networking*, berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi, serta interaksi formal dan informal, (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan, undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan, kebijakan serta daya dukungan keuangan atau anggaran, dan (5) lingkungan secara luas,

meliputi: faktor politik, ekonomi, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Brown (Haryanto, 2014) menjelaskan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Haryanto, 2014) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai pembangunan atau peningkatan kemampuan (*capacity*) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan *output* dan *outcome* pada kerangka tertentu. Sedangkan menurut Merilee S. Grindle (Ratnasari, 2013) *capacity building* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang berkembang untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus, dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (Fatimah, 2018) adalah:

- a. Pengembangan sumber daya manusia, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen.
- b. Penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan
- c. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta

makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Dari berbagai penjelasan tentang pengembangan kapasitas di atas, pengembangan kapasitas dapat disimpulkan sebagai proses peningkatan kemampuan individu atau organisasi atau komunitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*, *outcome* yang telah ditentukan.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan program pengembangan kapasitas secara garis besar terbagi ke dalam dua komponen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kepemimpinan, komitmen bersama (*collective commitment*), pengakuan bersama atas kelemahan dan kekuatan, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas. Sedangkan faktor eksternal meliputi: *networking*, informasi, dan regulasi. Berikut faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan kapasitas :

1. Aspek Kepemimpinan.

Kepemimpinan yang kondusif (*condusive leadership*) merupakan hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi kesuksesan program *institutional capacity development*. Organisasi harus secara terus-menerus mendorong terciptanya sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis dan adaptif sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Ciri kepemimpinan yang kondusif adalah adanya kesempatan yang luas pada setiap komponen organisasi termasuk sumber daya personal untuk melakukan inisiasi-inisiasi dalam pengembangan

kapasitas menuju pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang diinginkan.

2. Aspek Komitmen

Komitmen bersama (*collective commitment*), Komitmen bersama merupakan keterlibatan seluruh aktor organisasi dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas kelembagaan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.

3. Aspek Pengakuan

Pengakuan atas kelemahan dan kekuatan lembaga. Proses pengembangan kapasitas kelembagaan diawali dengan identifikasi *existing* kapasitas. Oleh sebab itu, organisasi dan individu harus secara transparan mengemukakan kekuatan dan kelemahan atas kepastian yang tersedia. Keterbukaan akan pengakuan kondisi kapasitas yang ada ini sangat penting, mengingat separuh dari persyaratan kesuksesan program pengembangan kapasitas kelembagaan berawal dari kejujuran dan validitas dalam mengemukakan kekuatan dan kelemahan kapasitas yang tersedia.

4. Aspek Partisipasi

Partisipasi dari seluruh unsur lembaga, mulai dari staf terbawah sampai kepada pimpinan tertinggi di sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mengsucceskan program pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk

itu, dalam rangka menjamin *sustainability* sebuah program, maka sebuah inisiasi harus dibangun mulai dari tataran staf terbawah hingga pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi.

5. Aspek Inovasi

Institutional Capacity Development merupakan salah satu bentuk inovasi. *Capacity development* merupakan sebuah program yang dinamis, yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Untuk itu, inovasi merupakan bagian yang cukup penting dalam *capacity development*, khususnya dalam menyediakan berbagai alternatif dan metode pembangunan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan.

6. Aspek Transparansi

Transparansi menjadi aspek penting dalam pengembangan kapasitas kelembagaan khususnya dalam rangka pengendalian pelaksanaan program agar tujuan program dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, transparansi merupakan aspek yang mampu menjamin agar program pengembangan kapasitas berjalan secara *legitimate*, *kredibel*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Aspek Networking

“Networking is a process of getting together to get ahead. It is a building of mutually beneficial relationship”. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi program pengembangan kapasitas kelembagaan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini bisa disebabkan oleh

keengganan individu untuk membangun mitra, dan mengabaikan aspek kerjasama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Harus dipahami bahwa proses pengembangan kapasitas kelembagaan tidak dapat dilakukan secara ego kelembagaan, namun perlu dilakukan melalui kerjasama dengan para *stakeholder* terkait.

8. Aspek Informasi

Informasi mengenai perubahan lingkungan atau perubahan akan kebutuhan pelayanan masyarakat/produk sangat berguna bagi organisasi sebagai dasar dalam mendesain program-program pengembangan kelembagaan. Organisasi yang memiliki sedikit informasi tentang berbagai perubahan yang ada di lingkungan akan berpengaruh terhadap kualitas dan keberhasilan program-program pengembangan yang didesain.

9. Aspek Regulasi

Pola pikir seperangkat pimpinan dan budaya para pegawai sebuah kelembagaan yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta berbagai faktor *legal-prosedural* dari pemerintah dapat menjadi faktor penghambat serius dalam keberhasilan program pengembangan kelembagaan. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari sebuah implementasi program, reformasi terhadap berbagai regulasi yang dilakukan secara

konduktif dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang muncul, merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka

mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas kelembagaan (Haryanto, 2014).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara khusus Riyadi (Ratnasari, 2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

a. Komitmen bersama

Collective Commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkan kembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.

b. Kepemimpinan

Faktor *Conducive Leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana

yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

c. Reformasi peraturan

Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlandung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi penyelenggaraan peraturan yang kondusif perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.

d. Reformasi Kelembagaan

Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan

kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Proses pengembangan kapasitas berkaitan dengan strategi menata *input* (masukan) dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome* secara optimal, serta menata *feedback* sebagai langkah perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata masukan berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sehingga siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam mendesain, memproses dan mengembangkan seperangkat kebijakan, struktur organisasi dan manajemen. Strategi menata umpan balik (*feedback*) berkaitan dengan kemampuan organisasi melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi hasil yang telah diacapai, dan mempelajari kelemahan atau kekurangan yang ada pada masukan, proses, dan melakukan tindakan penyempurnaan secara nyata dengan melakukan berbagai penyesuaian lingkungan yang terjadi (Haryanto, 2014).

Pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas dari kinerja suatu lembaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan memusatkan perhatian kepada 3 dimensi atau tingkatan, yaitu: (1) dimensi sistem, (2) dimensi entitas, (3)

dimensi individu. Dalam dimensi sistem, maka perubahan diarahkan pada reformasi kebijakan, yaitu melakukan perubahan pada “aturan main” dari kerangka kerja kelembagaan yang dapat mendorong proses pencapaian tujuan-tujuan secara efektif dan efisien (Kusmiati, 2016).

Dalam dimensi entitas atau organisasi, maka penguatan kelembagaan diarahkan pada perbaikan instrumen manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas pada seluruh lini organisasi dan perbaikan pada struktur mikronya. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata kembali struktur organisasi, mekanisme tata kerja, proses pengambilan keputusan, sistem komunikasi internal dan eksternal (jaringan komunikasi), sistem kepemimpinan, sistem insentif dan sistem pemanfaatan personel. Pada tingkat individu, maka pengembangan kapasitas diarahkan pada pengadaan, penyediaan dan pemanfaatan personil yang kompeten secara manajerial dan secara teknis atau substantif. Kegiatan utama difokuskan pada sistem rekrutmen, pemetaan kompetensi pegawai, pelatihan, penempatan, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, sistem insentif dan sistem penilaian kerja (Haryanto, 2014).

Kepemimpinan juga diperlukan untuk pengembangan kapasitas, dimana kepemimpinan merupakan suatu yang dinamis, penting, dan memiliki kompleksitas tinggi. Dalam (Sedarmayanti, 2016) menyebutkan kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab.

Kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau dan tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, hubungan interaksi antarpengikut dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama, proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan, proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk pencapaian sasaran, proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu.

Menurut (Sedarmayanti, 2016), menyebutkan tipe kepemimpinan yang terbentuk dari pola dasar kepemimpinan, yaitu:

a. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibanding dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah.

b. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas (*Laissez faire*)

Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberi kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

c. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang yang dipimpinnya sebagai subyek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreatifitas, inisiatif yang berbeda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini berusaha memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan aktif, dinamis, dan terarah, dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Ketiga tipe kepemimpinan di atas dalam praktiknya saling mengisi atau menunjang secara bervariasi, disesuaikan dengan situasinya akan menghasilkan kepemimpinan efektif.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Biasa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Secara istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah dari kata *government*. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badanbadan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara (Zaidan, 2013).

pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah.

Menurut Syafiie (Anggara, 2012) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

3. Konsep Pengurangan Resiko Bencana

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR), PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana (Ariantoni, dkk, 2009). PRB direalisasikan dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan resiko di sekolah/madrasah.

Pengurangan resiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak yang terkait. Setelah suatu bencana terjadi pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya tidak menyebabkan bencana terjadi lagi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).

Menurut (Tamin, 2006), *Disaster* atau bencana dapat dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda,

kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan. Pengertian yang kurang lebih sama juga dijelaskan menurut standar pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh ICRC, bahwa bencana adalah krisis (akibat kegagalan interaksi manusia dengan lingkungan fisik & sosial) yang melampaui kapasitas individu & masyarakat untuk menanggulangi dampaknya yang merugikan.

PRB merupakan sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan PRB lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan lokal dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan UN-ISDR tersebut, tampak jelas mengenai bagaimana proses pembelajaran pendidikan pengurangan resiko bencana harus dilakukan, mencakup luasnya cakupan materi dari pendidikan PRB.

Konsep PRB berbasis Pendidikan adalah proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam kurikulum pendidikan meliputi perluasan kerja dan hasil dari; kebijakan, kerangka, strategi, perencanaan, pembelajaran pada peserta didik; atau pun menyusun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan untuk pengurangan resiko bencana (Direktorat Jenderal, 2010) antara lain mencakup; (a) menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan, (b)

menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap resiko bencana, (c) mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi, (d) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab dan adaptasi terhadap resiko bencana, (e) mengembangkan upaya untuk pengurangan resiko bencana diatas, baik secara individu maupun kolektif, (f) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana, (g) meningkatkan kemampuan tangga darurat bencana, dan (h) mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana, serta (i) meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dan aktif dalam berbagai kancan Internasional, mengikuti dan mengadopsi konsep PRB yang berlaku di dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga terikat dengan *The Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015*. HFA berisi tiga tujuan strategi dan lima prioritas kegiatan untuk periode 2005-2015. Tiga tujuan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi yang lebih efektif pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan secara berkelanjutan, perencanaan dan penyusunan program pada semua jenjang dengan secara khusus

memberikan penekanan pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan.

- b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan, mekanisme, dan kapasitas pada semua tingkat secara lebih khusus pada tingkat masyarakat, yang dapat secara sistematis memberi sumbangan terhadap pembangunan ketangguhan dalam menghadapi bahaya.
- c. Kerjasama sistematis dari pendekatan pengurangan resiko bencana kedalam rencana dan pelaksanaan program tanggap darurat, respon dan program pemulihan di dalam proses rekonstruksi dari masyarakat yang terkena bencana.

Sedangkan lima prioritas kegiatan *The Hyogo Framework for Action* (HFA) pada periode 2005-2015 bencana (Direktorat Jenderal, 2010) meliputi:

- a. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya.
- b. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan memonitor resiko-resiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini.
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan.
- d. Mengurangi faktor-faktor resiko dasar, dan
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi resiko bencana pada tingkat

lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumber daya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.

Pendidikan pengurangan dari resiko bencana merupakan implementasi dari prioritas ke tiga Kerangka Kerja Hyogo yaitu menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan, sehingga resiko bencana dapat berkurang apabila kepada setiap orang diberi informasi dan dimotivasi untuk memiliki budaya pencegahan bencana dan ketangguhan terhadap bencana dengan cara mengumpulkan, mengkompilasi dan menyebarkan pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bencana, kerentanan dan kapasitasnya. Poin pendidikan dalam kerangka kerja Hyogo, secara eksplisit menjelaskan pengembangan pendidikan PRB menggunakan kunci-kunci yang telah dikembangkan dalam gerakan dasawarsa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (2005-2014) yang berpedoman pada prinsip-prinsip dibawah ini:

- a. Interdisiplin dan menyeluruh: pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan terkandung dalam keseluruhan kurikulum, tidak (harus) sebagai mata pelajaran yang terpisah.
- b. Berorientasi nilai, nilai dan prinsip bersama yang mendasari pembangunan berkelanjutan menjadi norma yang dianut. Namun dapat diperiksa, didebat, diuji dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan.

- c. Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah; membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan pembangunan berkelanjutan.
- d. Multimetode; pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka.
- e. Pembuatan keputusan yang berpartisipatori, dimana peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar.
- f. Pengaplikasian; pengalaman pembelajaran terintegrasi dalam keseharian kehidupan pribadi dan profesional.
- g. Sesuai secara lokal, membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh pembelajar.

Konsep-konsep yang telah dipaparkan tersebut menjadi acuan dan diadopsi dalam kegiatan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di lembaga pendidikan. Pengarusutamaan PRB di lembaga pendidikan sangat penting untuk diwujudkan mengingat bahwa sebagian besar lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengingat, posisi NKRI berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana setiap saat mulai dari bencana, baik sifatnya ringan, sedang, hingga bencana berat. Selain itu, PRB merupakan implementasi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang mencakup tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu (1) sebelum (pra) bencana, (2) saat terjadi

bencana, dan (3) sesudah (pasca) kejadian bencana bencana (Direktorat Jenderal, 2010).

Bidang penataan ruang pada saat ini yang hampir bersamaan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan payung hukum dalam upaya mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut belum secara eksplisit menyebutkan bagaimana penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan terutama di kawasan lindung dan strategis. Pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana”.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan berbagai konsep yang telah dipaparkan maka dapat disusun kerangka pikir yang merupakan penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang ada, agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian adalah bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa indikator signifikan pengembangan kapasitas yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi

kelembagaan dalam pengembangan kapasitas pemerintah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, adalah pelaksanaan program yang mengarah kepada peningkatan pengetahuan birokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab aparatur dalam rangka mewujudkan pengembangan kapasitas pemerintah pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo.
2. Penguatan organisasi adalah seluruh aspek yang mendukung terlaksananya fungsi manajemen BPBD Luwu Timur dalam rangka penanggulangan bencana yang berupa rencana strategis untuk mewujudkan pengembangan kapasitas pemerintah pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo.
3. Reformasi kelembagaan, adalah perubahan paradigma organisasi dalam membentuk pola kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sehingga dapat berkorelasi dengan pengembangan kapasitas pemerintah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak 2 Oktober 2020 sampai 2 Desember 2020 di kantor dinas Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun 2016, Luwu Timur termasuk 146 daerah yang rawan bencana dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan telah terjadi bencana tanah longsor yang meyapu belasan rumah dan menelan korban jiwa di Dusun Harapan Makmur Desa Maliwowo, Kab. Luwu Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data yang tertulis hasil wawancara, berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yang berupaya menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal yang

kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijarang dari sumber data primer dan data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Yaitu, Tim Reaksi Cepat (TRC), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan masyarakat yang terkena dampak bencana Longsor di Desa Maliwowo.
2. Data Sekunder, berupa catatan-catatan penting di lapangan, data-data terkait instansi BPBD, data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang mendukung pengembangan kapasitas pemerintah dalam pengurangan resiko bencana. Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari data yang telah dikumpulkan di lapangan yang selanjutnya diolah menjadi sebuah laporan.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan

terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kreteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Dalam hal peneliti ingin mengetahui tentang pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Rustam Ishap, S.Sos	RT	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana
2.	Chalijah S.Stp	CJ	Kabid Perencanaan
3.	Andi Ariska	AR	Bidang Kepegawaian
4.	Wanda	WD	Tim Reaksi Cepat
5.	I Ketut Riawan Budiarta	KR	Camat Angkona
6.	Haslinda	HD	Staf Kecamatan
7.	Asdar	AD	Kades Maliwowo
8.	Wiwik	WI	Kasi Pemerintahan
9.	Sofyan	SF	Masyarakat
10.	Yulianti	YL	Masyarakat
11.	Farhan	FH	Masyarakat
Jumlah Total		10	Informan

(Sumber: Diolah Oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Observasi mengenai topografi wilayah desa Maliwowo yaitu termasuk dalam dua kelompok jika berdasarkan kemiringan lereng. a) kemiringan $< 15\%$ wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir dan pada bagian tengah kecamatan Angkona. b) kemiringan $> 25\%$ yaitu dimana wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam.

Desa Maliwowo termasuk wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana tanah longsor ancaman tingkat tinggi karena wilayah pegunungan dan kemiringan lereng yang curam dan kondisi curah hujan tinggi.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana arsip-arsip yang dianggap menunjang dan penting dengan persoalan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, laporan tahunan, jurnal, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah serta undang-undang yang telah ada pada organisasi yang terkait dipelajari, disusun dan dikaji sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna membagikan informasi berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. (Pertama), Reduksi Data, yaitu cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat. (Kedua), Penyajian Data, seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya. (Ketiga), Menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masi belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.

G. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2016) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjutnya Sugiyono membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen.

Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masi menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dibuat dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas sebelah utara dan sebelah timur adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Batas sebelah selatan adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah barat kabupaten ini adalah Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang ibu kotanya adalah Malili, mempunyai luas wilayah $6.944,88 \text{ km}^2$ atau meliputi sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berjarak $\pm 560 \text{ km}$ dari Kota Makassar, dapat ditempuh selama ± 12 jam lewat darat atau dengan pesawat udara. Secara administrasi kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena.

Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (15 desa), Wotu (13 desa), Tomoni (12 desa), Angkona (8 desa), Malili (15 desa), Towuti (13 desa), Nuha (5 desa), Mangkutana (10 desa), Kalaena (8 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).

Terdapat 14 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana, Kec. Kalaena, Kec. Tomoni Timur, Kec. Angkona dan Kec. Wotu. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano berada di Kecamatan Nuha, sedangkan Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Taparang Masapi, dan Danau Lontoa berada di Kecamatan Towuti. Danau yang terdalam adalah Danau Matano (589 m) dan danau yang terluas adalah Danau Towuti (585 km²).

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata curah hujan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember, dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeek merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha berada pada wilayah ketinggian di atas 1000 m dpl. Demikian halnya dengan Kecamatan Towuti yang didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl.

Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone, pola alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendrit dengan air terjun di beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan morfologi dewasa. Sistem sungai ini membentuk 2 Daerah Aliran Sungai yang sangat penting di Kabupaten Luwu Timur yaitu DAS Kalaena dan DAS Larona. Sungai-sungai yang membentuk kedua DAS ini memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur namun di sisi lain menjadi ancaman yang berpotensi bencana yang sangat merugikan.

Sistem Sungai Kalaena merupakan kumpulan sungai besar yang berada pada DAS Kalaena dimana semuanya bermuara di Teluk Bone sedangkan hulunya berada di Pegunungan Fenema Kabupaten Morowali, adapun sungai tersebut dari yang paling utara sampai ke selatan adalah:

- a. Sungai Doe
- b. Sungai Maniu
- c. Sungai Bintonu
- d. Sungai Sulumange
- e. Sungai Endeme
- f. Sungai Tomoni
- g. Sungai Karambua
- h. Sungai Pawosoi

Gambar 4.1 DAS Kalaena Kabupaten Luwu Timur



2. BPBD Kabupaten Luwu Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur serta tupoksinya berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk mendukung Visi Kabupaten maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menetapkan visi berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana”

Dengan misi:

- a) Melindungi masyarakat dari bencana;
- b) Menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal; dan
- c) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

c. Tujuan

- a) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui perilaku dan budaya sadar bencana.
- b) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- c) Mewujudkan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

d. Sasaran

- a) Terwujudnya ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku dan budaya sadar bencana;
- b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- c) Terwujudnya peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

e. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas Kepala Badan, Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah.

a) Kepala Badan

Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

b) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana serta melaksanakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana.

c) Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana

II. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

III. Bidang Pencegahan, Kesipsiagaan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Keslapiagaan dan Pemadam Kebakaran

IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

1. Seksi Kedaruratan
2. Seksi Logistik

V. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

1. Rehabilitasi
2. Seksi Rekonstruksi

d) Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luvu Timur terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat professional dan ahli. Tugas unsur pengarah adalah menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan daerah, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

f. Program dan Kegiatan

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu:

- 1) Program Kesiapsiagaan, meliputi kegiatan:
 - a. Rekrutmen Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana
 - b. Fasilitasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- 2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 3) Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban, meliputi kegiatan:
 - a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - b. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana
 - c. Pemberian Bantuan Darurat Bencana
- 4) Program Pembinaan Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan Peraturan Standar Keselamatan
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan: Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- 6) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi kegiatan:

a. Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam.

b. Perbaikan sarana dan prasarana umum akibat bencana

Selain itu BPBD Kab. Luwu Timur menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan dunia usaha melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan latihan SAR tingkat dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh SAR Malili
 2. Pelatihan Pemuda Tanggap Bencana yang dilakukan oleh Kelompok Pencinta Alam Genali
 3. Kemah Kerja dan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana oleh PMI Kab. Luwu Timur
 4. Memberikan bantuan peralatan tenda pada kegiatan kepemudaan seperti Pramuka, PMR, KSR, PMI, SAR dan Kelompok-Kelompok Pemuda Pencinta Alam serta Organisasi kemasyarakatan lainnya.
- g. Pihak terkait dalam penanggulangan bencana
- Beberapa pihak yang selama ini memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. PT. Vale Indonesia Tbk.
2. SAR Malili
3. PMI Kab. Luwu Timur
4. Manggala Agni (Brigade Pemadam Kebakaran Hutan Malili)
5. Pramuka

6. Tagana

7. Relawan Penanggulangan Bencana

Tabel 4.1 Peralatan Penanggulangan bencana

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Tahun perolehan	Kondisi
1.	Mobil Rescue (double cabin)	1 unit	2017	Baik
2.	Motor Trail Rescue	2 unit	2017	Baik
3.	Perahu Karet kapasitas 8 orang	2 unit	2016	Rusak berat
4.	Perahu Karet kapasitas 10 orang	1 unit	2018	Baik
5.	Tenda posko	1 unit	2017	Baik
6.	Tenda Pleton	3 unit	2016/2017	Baik
7.	Tenda Regu	3 unit	2017	Baik
8.	Tenda Keluarga	6 unit	2016/2017	Baik
9.	Tenda Gulung	15 lembar	2016	Baik
10.	Velbed	10 set	2017	2 rusak
11.	RIG	1 unit	2017	Baik
12.	SSB	1 unit	2017	Baik
13.	Lampu Senter Hid Searchlight	1 unit	2017	Baik
14.	Genset SKVA	1 unit	2017	Baik
15.	Water Treatment Portable	1 Set	2017	Rusak
16.	Pelampung	3 buah	2016	Baik
17.	Alcon	2 set	2017	Baik
18.	Waterous (Alat	2 unit	2017/2018	Baik
19.	Tandu Keselamatan	2 unit	2018	Baik
20.	Alat Selam	3 unit	2018	Baik
21.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	13 unit	2017/2018	Baik
22.	Baju Tahan Panas	7 psng	2018	Baik

(Sumber: BPBD Kabupaten Luwu Timur)

3. Profil Desa Maliwowo

Desa Maliwowo merupakan desa administrative yang wilayahnya berada di pemerintahan Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

dengan luas wilayah $\pm 41 \text{ km}^2$ serta berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Argomulyo

Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Timur : Desa Watang Panua

Sebelah Barat : Desa Kalaena dan Desa Bahari

Desa Maliwowo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Harapan Makmur I Luas ± 9.5 km² RT, Dusun Harapan Makmur II Luas ± 10.5 km² RT, Dusun Ujung Batu 2 Luas ± 10.5 km² RT, Dusun Bubu Luas ± 10.5 km² RT, Jumlah Sungai yang melintas di wilayah Desa : 1 (Satu).

Adapun total keseluruhan Jumlah Penduduk yaitu : 2575/Th. 2016 yang terbagi kedalam Jumlah Penduduk Laki-laki : 1296 dan Jumlah Penduduk Perempuan : 1279 dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 620. Adapun Dusun yang terpadat Penduduknya : Dusun Harapan Makmur serta Dusun yang terkurang penduduknya : Dusun Bubu.

Desa Maliwowo dilengkapi dengan fasilitas kesehatan Sarana dan prasarana kesehatan yang ada meliputi : Puskesmas & Posyandu serta tempat ibadah yang terdiri dari:

1. Mesjid : 4
2. Mushalla : 1
3. Gereja : 3

Adapun mata pencaharian masyarakat kebanyakan bergerak pada sektor pertanian, Luas lahan persawahan/Th.2015 30 ha/m² Fasilitas Irigasi yang di gunakan : Mata air, Sumur Ladang, dan Sungai. Jenis Tanaman pangan yang di produksi antara lain : Jagung, Padi, dan sinking. Jumlah produksi pada Tahun 2015 sebesar 500 Ton dari luas lahan panen 250 Ha. Jenis buah-buahan yang di produksi Rambutan, Semangka, Durian dan

Duku. Jumlah produksi buah-buahan terbanyak 1 Ton/Th. 2015. Jenis tanaman perkebunan yang di produksi antara lain : Jagung, Kacang-kacangan, Ubi Jalar, Cabe, Tomat, Mentimun, Kacang Tanah, Terong, dan Bayam dengan jumlah produksi terbanyak 3 Ton/ 1 ha.

Begitu pula masyarakat yang bergerak dalam bidang peternakan Jenis hewan ternak yang di budi daya antara lain : Sapi, Kerbau, Babi, Bebek, Kambing, dan Anjing. Populasi hewan ternak terbanyak adalah Bebek dengan jumlah produksi 100 ekor. Jenis perikanan yang di budidaya dalam kolam dan disawah adalah ikan Karpas dengan jumlah produksi/Th. 2015 mencapai 125 Ton, dan jumlah hasil produksi budi daya ikan tambak/Th. 2015 mencapai 250 Ton/panen dari jumlah tambak yang ada seluas 250 Ha, Jumlah Rumah Tangga yang membudi daya ikan sebanyak 100/Th. 2015. Sementara potensi pertambangan dapat terlihat dari Potensi tambang galian C di Desa Maliwowo meliputi batu/koral dan pasir terdapat di Dusun Harapan Makmur II.

B. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

Bencana alam merupakan salah satu permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap publik. Semenjak berlakunya undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadikan tanggung jawab manajemen bencana

dilimpahkan ke daerah sehingga terbentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Pada tahun 2017 Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur mengalami kejadian bencana longsor, dimana akibat longsor tersebut membuat timbulnya korban jiwa sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 14 rumah di kabarkan rusak berat. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah tersebut membuat BPBD Kabupaten Luwu Timur harus siap siaga dalam meminimalisir dampak dari bencana tanah longsor yang memang sering melanda wilayah tersebut.

Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan juga longsor sehingga pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mengurangi dampak dan resiko bencana alam yang terjadi terkhusus di lokasi penelitian penulis desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Melalui pendekatan tiga indikator penulis mendapatkan hasil penelitian yang akan di tuangkan dalam pembahasan ini dengan melihat tiga poin seperti, pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan yang diuraikan penulis dalam pembahasan berikut ini:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi organisasi karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional lembaga. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi

pemerintahan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum.

Berikut Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur, dalam bentuk tabel :

Tabel 4/2

Daftar Pegawai Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (2017-2020)

Tahun	PNS	Upah Jasa		
		TRC	Sopir	Cleaning Service
2017	14	18	2	1
2018	15	20	2	1
2019	15	25	2	2
2020	16	28	3	2

Sumber: BPBD Kabupaten Luwu Timur 2020

Berdasarkan tabel di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada tahun 2017 terdapat 14 orang yang terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPBD dan ada 21 orang yang menjadi Tenaga Honorer atau Upah Jasa yang terbagi dalam 18 orang Tim Reaksi Cepat (TRC) dan 2 orang sopir serta 1 orang *Cleaning Services* (CS), kemudian pada tahun 2018 ada 15 orang PNS, dan 23 orang Upah Jasa yang terbagi dalam 20 orang anggota TRC, 2 orang sopir dan 1 orang CS, kemudian pada tahun 2019 ada 15 orang PNS, dan 29 orang Upah Jasa yang terbagi dalam 25 orang anggota TRC, 2 orang sopir dan 2 orang CS dan pada tahun 2020 jumlah PNS terdapat 16 orang, dan 33 Tenaga Upah Jasa yang terbagi dalam 28 anggota TRC, 3 orang Sopir dan 2 orang CS.

Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa terjadi penambahan anggota atau pegawai Dinas Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Luwu Timur, khususnya untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dikhususkan untuk menangani bencana di lapangan. Terbentuknya TRC sebagai bentuk program BPBD dalam pengurangan resiko bencana dalam bentuk lebih cepat, tanggap dan sigap dalam bertugas.

Tabel 4.3

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kegiatan Pengembangan Kapasitas		
No.	Peningkatan Kuantitas	Peningkatan Kualitas
1.	Penambahan anggota yang bertugas dilapangan yaitu, Tim Reaksi Cepat (TRC)	Pelatihan : a. Pelatihan teknik penyelamatan, yaitu : Penyelamatan di air, penyelamatan di gunung dan penyelamatan di hutan b. Pelatihan sistem komando terpusat c. Pelatihan <i>Vertical Rescue</i> d. Mekanisme kedaruratan bidang kesehatan e. Mekanisme kedaruratan bidang logistik f. Mekanisme kedaruratan bidang penyelamatan pengungsi Pendidikan Dasar : a. Penyuluhan penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana b. Manajemen penanggulangan bencana c. Pengenalan dan penggunaan alat penanggulangan bencana d. Simulasi penanggulangan banjir dan pedoman penyelamatan di air
2.	Merekrut Relawan yang dipilih dari masyarakat kemudian dilatih secara khusus	

(Sumber BPBD Luwu Timur)

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara kompeten kepada para aparatur dalam rangka pengurangan

resiko bencana merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui program-program pelatihan, pendidikan dasar agar para aparaturnya dapat siap siaga dalam upaya tanggap bencana.

“Sebagai instansi yang bertugas sebagai penanggulangan bencana daerah tentu kami berupaya melakukan perbaikan di semua lini termasuk penambahan tenaga aparaturnya dalam rangka mendukung program-program yang berkenaan dengan penanggulangan bencana. Salah satu program yang kami perkuat dalam rangka mempersiapkan unit-unit kerja yang ada melalui kegiatan dan pendidikan kepada aparaturnya agar lebih cepat, tanggap dan sigap dalam bertugas. Selain itu pihak kami telah mengusulkan kepada DPR untuk memenuhi semua kebutuhan termasuk penambahan unit agar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik” (Wawancara dengan RT 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam rangka memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur pihak BPBD mengusulkan penambahan unit kerja dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan agar semua aparaturnya dapat memahami langkah-langkah dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pegawai dalam suatu organisasi sebagai sumber daya manusia, dan sebagai hasil proses seleksi harus dikembangkan agar kemampuan mereka dapat mengikuti perkembangan organisasi. Di dalam suatu organisasi, unit atau bagian yang mempunyai tugas untuk pengembangan tenaga ini biasanya unit pendidikan dan pelatihan pegawai. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan pegawai (sumber daya manusia) agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Oleh sebab itu, kegiatan pengembangan pegawai dirancang untuk

memperoleh pegawai-pegawai yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu organisasi atau instansi dalam geraknya di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

Sejalan dengan wawancara informan sebelumnya, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan di lapangan, berikut :

“Untuk program pelatihan memang rutin dilakukan setiap tahun, kami dari BPBD akan mengutus beberapa orang ke Bogor sebagai perwakilan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pelatihan terkait pengembangan kemampuan tanggap bencana apabila terjadi bencana di lapangan. Kemudian orang yang kami utus ke luar daerah untuk mendapatkan pelatihan tersebut, setelah kembali akan mengajarkan atau menjelaskan keahlian yang didapatkan kepada anggota BPBD lainnya”. (Hasil wawancara bapak RT, 18/10/2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pada program pelatihan yang dilakukan adalah program pelatihan rutin dilakukan setiap tahun dengan cara anggota BPBD akan mengirim beberapa orang ke luar kota untuk mendapatkan pelatihan terkait peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana agar lebih cepat tanggap, apabila terjadi bencana di lapangan. Setelah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan tentang tanggap bencana, maka pelatihan yang didapatkan akan diberikan kembali kepada anggota BPBD lainnya.

Setelah itu para anggota dari BPBD akan terjun ke lapangan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi relawan tanggap bencana di lingkungannya masing-masing. Agar ketika terjadi bencana

relawan di lingkungan tersebut bisa terjun langsung dalam menangani bencana, sebelum anggota BPBD datang ke lokasi kejadian bencana.

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh informan WD, di lapangan sebagai berikut :

“untuk tanggap bencana ketika terjadi bencana di lapangan, maka memang dilakukan beberapa pelatihan untuk yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat, yaitu dengan pelatihan penyelamatan korban di dalam air, teknik penyelamatan korban di gunung akibat tertimpa reruntuhan gempa atau longsor ataupun penyelamatan korban di hutan. Akan tetapi yang juga tak kalah penting adalah membekali anggota Tim Reaksi Cepat untuk mengutamakan keselamatan pribadi terlebih dahulu. Karena jangan sampai niat untuk menyelamatkan diri justru menjadi boomerang bagi si penyelamat”. (Hasil wawancara dengan Ibu WD, 18/10/2020).

Berdasarkan wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa untuk tanggap bencana di lapangan apabila terjadi suatu bencana, maka Tim Reaksi Cepat (TRC) telah diberikan pelatihan khusus tentang tata cara penyelamatan korban apabila terjadi di dalam air, di gunung atau di hutan. Ada beberapa teknik menyelamatkan korban bencana alam, sebagai berikut :

a. *Water Rescue* (Penyelamatan di Air)

Water Rescue merupakan tindakan penyelamatan kepada korban yang berada di media berair khususnya di sungai, rawa dan danau. Keahlian khusus yang dibutuhkan dalam medan ini adalah kemampuan berenang dan menyelam.

b. *Mountain Rescue* (Penyelamatan di Gunung)

Mountain Rescue adalah tindakan penyelamatan korban yang berada di daerah gunung atau pegunungan dibutuhkan kemampuan seseorang yang bisa bertahan di daerah gunung dan mengenal baik tentang gunung.

c. *Jungle Rescue* (Penyelamatan di Hutan Rimba)

Jungle Rescue adalah tindakan penyelamatan korban yang ada di hutan rimba. *Jungle Rescue* berkaitan dengan *Mountain Rescue*. Kadang medan yang ditempuh memiliki ciri masuk ke dalam kategori hutan dan juga daerah gunung.

Dengan teknik-teknik penyelamatan korban yang diberikan melalui pelatihan agar cepat tanggap dalam bencana yang terjadi, Tim Reaksi Cepat dibekali pelatihan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang lain atau mengutamakan keselamatan diri terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaannya BPBD Luwu Timur melakukan reformasi birokrasi melalui program-program pengembangan pegawai yang dapat dilihat dari informasi sekretariat BPBD Luwu Timur (Sumber: BPBD Luwu Timur).

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melalui kegiatan:
 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja
 2. Perhitungan kebutuhan pegawai
 3. Penyusunan rencana redistribusi pegawai
 4. Penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun
 5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi.
- b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, dengan indikator:

1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)
- persyaratan jelas, tidak diskriminatif
3. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN
4. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dengan indikator:
 1. Telah ada standar kompetensi jabatan
 2. Telah dilakukan asesment pada sebagian besar pegawai
 3. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai
 4. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
 5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala
- d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, dengan indikator:
 1. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
 3. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif
 4. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen
 5. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka

e. Penetapan kinerja individu, melalui kegiatan dan indikator:

1. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
2. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
3. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dengan indikator:

1. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan
2. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi
3. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala
4. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (*reward*) kepada seluruh unit organisasi

g. Pelaksanaan evaluasi jabatan, dengan indikator:

1. Informasi faktor jabatan telah disusun
2. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
3. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan

h. Sistem Informasi Kepegawaian

1. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan
2. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

3. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

Kebijakan pengembangan profesionalisme aparatur hanya akan mencapai tujuan dan sasaran jika diimplementasikan dengan baik dan benar dengan kata lain keberhasilan suatu organisasi dalam mengembangkan profesionalisme akan sangat tergantung pada bagaimana implementasi kebijakan pengembangan profesionalisme itu pada tataran empiris.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur, BPBD senantiasa selalu memperhatikan kualitas aparaturnya dengan melakukan berbagai kegiatan yang berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan.

“Berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia ini berbicara tentang pegawai di BPBD ini, ada beberapa program untuk mengupgrade keseluruhan pegawai untuk yang sudah terlaksana dan sedang berjalan seperti pelatihan dan bimbingan teknis melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, tugas belajar, dan izin belajar, promosi atau kenaikan pangkat, mutasi atau perpindahan jabatan, dan pembinaan. Keseluruhan program tersebut sudah di laksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas pegawai di kantor BPBD Luwu Timur.” (Wawancara dengan AR 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia BPBD Luwu Timur telah mendorong beberapa program yang berkaitan dengan upaya

peningkatan kapasitas pegawai dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada wilayah manajemen bencana.

Untuk mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan profesional untuk mencapainya harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. Pendidikan formal masih belum memadai untuk mencapai kemampuan yang profesional. Untuk itu kemampuan SDM karyawan harus diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Memperbanyak tenaga kontrak yang bertugas dilapangan merupakan metode yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pelayanan kebencanaan di desa Maliwowo, setiap personil telah di bekali pengetahuan tentang wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana terlebih ketika memasuki musim penghujan. Dengan seperti itu para personil selalu siap siaga untuk meminimalisir resiko bencana.

"Semua personil di BPBD telah di bekali pengetahuan tentang pengelolaan bencana, mulai dari tingkat dasar sampai yang tertinggi. Untuk desa Maliwowo sendiri itu memang merupakan daerah rawan terjadi bencana longsor, para personil sendiri telah di bekali informasi tersebut melalui peta rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur sehingga semua anggota selalu siap siaga dalam memberikan sosialisasi, edukasi guna tahapan pencegahan bencana. Petugas lapangan juga wajib beraga 24 jam di posko BPBD dengan sitem shift, berganti gentian menjaga, sehingga jika ada panggilan darurat semua personil bisa bergerak cepat kelapangan." (Wawancara dengan CJ 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa para petugas lapangan BPBD telah di berikan pembekalan berupa pengetahuan terkait penerapan pengelolaan bencana. Hal tersebut didukung dengan diberikannya

peta kerawanan bencana sehingga personil lapangan BPBD selalu siap siaga ketika terjadi bencana.

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif, dan memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi.

Memahami bahwa wilayah pemerintahannya menjadi daerah yang rawan terjadi bencana longsor camat Angkona senantiasa mengingatkan kepada para kepala desa dan masyarakat agar senantiasa waspada dalam melihat potensi bencana yang bisa saja terjadi. Pemerintah kecamatan juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap lingkungan-lingkungan yang bisa saja berpotensi terjadi longsor.

"Selaku pemerintah di tingkat kecamatan kami sepenuhnya memahami ancaman bencana yang mengancam daerah ini, sehingga di setiap pertemuan di aula Kecamatan kami senantiasa menghimbau kepada para Kepala desa agar ikut terlibat dalam upaya mengurangi resiko bencana dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakatnya. Selain itu upaya pemeberian bimbingan tekhnis kepada para kepala desa agar tidak serta merta melakukan pembangunan dan pemberian izin yang bertentangan dengan keseimbangan lingkungan yang dapat berdampak kepada terjadinya bencana longsor." (Wawancara dengan KR 19/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat dalam rangka pengurangan resiko bencana alam di Kecamatan Angkona, pemerintah kecamatan senantiasa memberikan himbauan dan pemberian pengetahuan terkait pemeberian izin dan tata kelola lingkungan agar memperhatikan keseimbangan alam sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam.

Dalam arah pembangunan jangka panjang disebutkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya Nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen.

Desa Maliwoto merupakan desa yang sepanjang jalannya di kelilingi oleh tebing-tebing yang terjal yang mana sewaktu-waktu dapat memicu longsor. Pemerintah desa selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan karena dapat menimbulkan dampak bencana longsor. Selain itu pemerintah desa senantiasa mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan untuk di berikan pemahaman kebencanaan sehingga dapat ikut terlibat dalam mengurangi resiko bencana seperti tanah longsor.

“Seperti yang terlihat sepanjang jalan di desa kami ini terbentang tebing-tebing yang curam sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi bencana tanah longsor, adapun upaya pencegahan yang pemerintah desa lakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar ikut terlibat dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan-lahan perkebunan di wilayah yang rawan terjadi longsor. Pemberian edukasi kepada masyarakat sangat penting mengingat pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab kami selaku pemerintah desa. Pemerintah desa juga senantiasa memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemuda yang bertujuan memberikan pemahaman kebencanaan dengan demikian upaya-upaya penanggulangan bencana dapat berjalan beriringan dengan program-program dari BPBD itu sendiri.” (Wawancara dengan AD 20/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam rangka keterlibatan pemerintah desa dalam pengurangan resiko bencana tanah

longsor di Desa Maliwowo adalah dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif dari lembaga kepemudaan dalam mendukung pencegahan bencana longsor dengan upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat diwujudkan dengan Pendidikan Kebencanaan. Melalui pendidikan kebencanaan, masyarakat yang tinggal di daerah rawan ancaman bencana mempunyai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

Bencana seperti tanah longsor merupakan ancaman tersendiri yang meneror masyarakat desa Maliwowo di setiap musim penghujan. Masyarakat memilih pindah dan menghindari titik-titik yang rawan terjadi longsor. Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah agar senantiasa sigap dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir resiko bencana tanah longsor.

“Sebagai masyarakat tentu kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko dan dampak bencana, termasuk aspek pencegahan bencana. Pada saat terjadi bencana longsor pihak pemerintah sigap dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat hal tersebut merupakan sebuah bukti kesiapan tim BPBD dalam memberikan pertolongan ketika terjadi bencana.” (Wawancara dengan SF 20/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa upaya masyarakat sangat berharap kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan pada aspek pengurangan resiko bencana. Harapan

ini kemudian menjadi indikasi bahwa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengendalian resiko bencana tanah longsor dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai wujud dari Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur terlihat dari pembekalan berupa pelatihan dan pendidikan kepada personil lapangan badan penanggulangan bencana daerah dalam rangka menjalankan aktivitas penanggulangan bencana. Selanjutnya membekali para personil informasi yang berkaitan dengan peta rawan bencana sehingga para personil senantiasa siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana seperti tanah longsor. Selain memperbaiki kualitas BPBD Kabupaten Luwu Timur juga senantiasa mengusulkan penambahan personil lapangan dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana sehingga semua kebutuhan yang masuk dalam agenda pengurangan resiko bencana dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

2. Penguatan Organisasi

Suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan baik apabila mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhitungkan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan proses dasar dalam manajemen untuk merumuskan tujuan dan cara mencapainya.

Pelaksanaan kegiatan manajemen bencana tentu akan berjalan baik jika ditopang dengan penguatan kelembagaan dari BPBD Kabupaten Luwu Timur itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana secara struktur kelembagaan BPBD selalu berkoordinasi sehingga program dan arah pengurangan resiko bencana dapat berjalan secara maksimal.

“Kegiatan penanggulangan bencana itu disusun secara terstruktur, setiap bidang sudah dilengkapi dengan pengetahuan masing-masing sehingga benar-benar memahami tugas dan fungsinya dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Longsor di Desa Maliwowo yang terjadi tahun 2017 lalu sudah sampai kepada tahap rekonstruksi, kedepannya kita mengarahkan personil untuk lebih mengembangkan tahap mitigasi untuk mengantisipasi pengurangan resiko jika bencana tanah longsor kedepan terjadi lagi, adapun sistem kerja yang diterapkan yaitu satu komando dimana petugas lapangan juga telah terbentuk regu-regu yang dipimpin oleh danton, sehingga arah kerja organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.”
(Wawancara dengan CI 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bentuk penguatan organisasi yang dilakukan dengan saling berkoordinasi antara setiap divisi dengan menerapkan intruksi satu komando oleh pemimpin regu lapangan yang telah di bentuk dalam rangka pengurangan resiko bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan baik apabila mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhitungkan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan proses dasar dalam manajemen untuk merumuskan tujuan dan cara mencapainya, sehingga perencanaan memegang peranan yang lebih besar dibanding fungsi

manajemen lainnya. Semakin besar bentuk organisasi menuntut kemampuan manajemen yang lebih baik, terutama kemampuan teknis, karena semua pekerjaan dalam organisasi tidak dapat dilakukan sendiri.

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Perwujudan Renstra di setiap tahun adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam APBD Kabupaten Luwu Timur. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur, dievaluasi dan dilaporkan capaian kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai dasar penguatan organisasi BPBD Luwu Timur telah membuat strategi dan tujuan yang akan dicapai dalam fungsinya menjalankan kegiatan penanggulangan bencana yang jelaskan dalam tabel berikut ini:

Gambar 4.4 Matriks Tujuan, Sasaran dan Strategi/Kebijakan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	1.1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.1	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1.1	Penetapan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
						1.2	Penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana
						1.3	Penyiapan sumber daya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
						1.4	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan
						1.5	Meningkatkan kewaspadaan, partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana
		2.1	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	2.1	Optimalisasi penanganan darurat bencana	2.1	Penyediaan penanganan darurat sesuai dengan standar operasional prosedur
						2.2	Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		2.2	Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.2	Penyediaan mekanisme penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		2.3	Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana	2.3	Penyediaan kebutuhan sandang, pangan, penampungan/hunian sementara bagi korban bencana		
		3.1	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana	3.1	Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh		
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	2.1	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja	2.1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
					Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga	2.2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
						2.3	Peningkatan disiplin aparatur
						2.4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
						2.5	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
						2.6	Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran

(Sumber:BPBD Luwu Timur)

Tujuan penanggulangan bencana seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.24/2007 adalah (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh, (4) menghargai budaya lokal, (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (6) mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pada dasarnya pelaksanaan aturan yang tercantum dalam Undang-undang No.24 Tahun 2007 telah dilaksanakan dengan adanya upaya sinergitas dengan organisasi-organisasi kepemudaan dalam mendukung pelaksanaan jalannya tujuan organisasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

“Untuk BPBD Luwu Timur sendiri kami sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Dinas seperti DLH dalam melakukan reboisasi, Damkar, dalam upayanya meningkatkan penanggulangan bencana. Ada juga kerjasama dengan beberapa organisasi kepemudaan seperti SAR Malili, Opap, Batara Rescue yang merupakan organisasi relawan. Dalam sektor swasta sendiri sebagaimana yang kita ketahui bersama disini ada PT. Vale, sejauh ini perusahaan tersebut yang selalu mendukung segala aktivitas kami termasuk dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan penanggulangan bencana.” (Wawancara dengan AR 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan sebagai langkah penguatan organisasi BPBD Luwu Timur senantiasa bersinergi dengan beberapa stakeholder dalam menjalankan program penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 4.3

Latihan Gabungan dengan PT. Vale dalam rangka penanggulangan bencana



(Sumber: BPBD Luwu Timur)

Setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan benar, sehingga pengelolaan dan manajemen organisasi layak untuk dipelajari. Beberapa manfaat mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang beberapa teori, konsep, proses, teknik, dan mekanisme manajemen yaitu dapat mengembangkan keterampilan dan menerapkan konsep manajemen pada situasi tertentu, membantu meningkatkan kesejahteraan hidup serta menghapus keterbelakangan manajerial.

Salah satu metode yang dilakukan BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan kapasitas anggota pada pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana tanah longsor di Desa Maliwowo adalah dengan pemberian operasional serta penambahan tips bagi seluruh petugas dilapangan.

“Kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor di Desa Maliwowo dalam meningkatkan peran para tenaga lapangan BPBD dengan meningkatkan insentif kerja mereka sehingga para anggota juga semangat dalam rangka menjalankan kegiatan pengurangan resiko bencana. Selain itu bagi petugas di lapangan pada saat turun bertugas ketika terjadi bencana juga di berikan tambahan tips kerja dan juga suplemen, hal ini agar dapat memotivasi para petugas lapangan dalam bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh badan penanggulangan bencana Kabupaten Luwu Timur.” (Wawancara dengan WD 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dalam rangka kegiatan penguatan organisasi setiap anggota yang bekerja dilapangan di berikan operasional tambahan yang telah diajukan oleh manajemen dari BPBD itu sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja dari para petugas di lapangan dalam upayanya melakukan kegiatan penanggulangan kebencanaan.

Salah satu aspek penting sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan program kerjanya adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pemerintah kecamatan Angkona melihat bahwa BPBD Kabupaten Luwu Timur sudah dilengkapi sop kerja yang benar-benar terstruktur dan dipahami sepenuhnya oleh para staf bagian lapangan. Selain kapasitas anggota yang mempuni peralatan yang dibutuhkan juga sudah sangat lengkap sehingga upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor berjalan maksimal.

“Kalau saya melihat secara kesiapan dari kelembagaan BPBD Kabupaten Luwu Timur itu sudah sangat rapih. Itu terlihat pada saat bencana tanah longsor di Desa Maliwowo para petugas lapangan mereka sudah dilengkapi dengan alat-alat yang memudahkan pelaksanaan kerja dari petugas tersebut. Mereka juga membagi diri ke beberapa divisi yang sudah di susun oleh kelembagaan mereka sehingga semua keperluan-keperluan pada saat bencana terjadi dapat di tangani dengan sistematis.” (Wawancara dengan HD 19/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kesiapan petugas BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan pengurangan resiko akibat bencana tanah longsor di Desa Maliwowo sudah berjalan berdasarkan standar operasional dari BPBD Kabupaten Luwu Timur.

Komunikasi antar organisasi pemerintahan merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian, pendek kata agar terjadi penyetaraan dalam kerangka referensi.

Sebagai salah satu desa yang rawan terjadi bencana seperti tanah longsor pemerintah Desa Maliwowo sudah tentu selalu mengantisipasi dan mewaspada jika sewaktu-waktu dapat terjadi bencana yang dapat membahayakan jiwa dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut, sehingga pemerintah desa senantiasa membangun komunikasi dengan BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk meminta arahan dalam penanganan masyarakat sehingga dapat mengurangi resiko bencana.

“Selaku pemerintah desa tentu kami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan bagi warga dari ancaman bencana seperti tanah longsor, selain menyelenggarakan urusan administatif desa kami juga merancang sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tidak hanya longsor tetapi bencana yang bisa saja berpotensi melanda desa kami. Tentu pelaksanaannya kami senantiasa membangun komunikasi dengan BPBD Kabupaten Luwu Timur tentang langkah-langkah yang harus kami tempuh agar dapat saling bersinergi dalam pengurangan resiko kebencanaan bagi warga yang terdampak. BPBD sendiripun sangat terbuka jika kami meminta saran dan arahan terkait pemahaman kebencanaan, tentu hal tersebut merupakan keseriusan BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.” (Wawancara dengan WI 20/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor turut melibatkan pemerintah desa dengan membuat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari BPBD Kabupaten Luwu Timur. Sikap terbuka BPBD dalam memberi masukan terhadap pemerintah desa jelas menjadi keseriusan lembaga tersebut dalam rangka pelaksanaan manajemen kebencanaan.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Masyarakat desa Maliwowo tentu merasakan dampak dari resiko bencana Tanah Longsor bukan hanya dari segi korban jiwa tetapi

pemukiman mereka yang rusak akibat tanah longsor. Belum lagi permasalahan psikologis yang menghantui masyarakat ketika musim penghujan tiba, efek trauma akibat dari bencana tanah longsor membuat masyarakat selalu di hantui ketakutan.

“Masyarakat disini sangat trauma akibat bencana longsor yang melanda desa kami pada waktu itu, kami takut sewaktu-waktu terjadi longsor lagi yang menyebabkan kami was-was dan sulit untuk tidur ketika musim penghujan tiba. Perbaikan memang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat longsor dan pemberian bantuan lain-lain akibat dari dampak bencana. Bahkan ketika musim penghujan tiba ada beberapa orang dari BPBD yang terus memantau desa kami, hal tersebut tentu dapat mengurangi keresahan masyarakat akibat bahaya bencana tanah longsor.” (Wawancara dengan YL 20/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa perbaikan dan rekontruksi pada saat terjadi bencana tanah longsor dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk mengurangi dampak dan resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait penguatan organisasi dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan memperkuat tenaga lapangan dengan menekankan kepada pemberian insentif kerja yang dapat memotivasi anggota agar bekerja sesuai dengan arah kebijakan organisasi. Selanjutnya sebagai bentuk penguatan kelembagaan perbaikan standar operasional kerja telah dilakukan untuk mempertegas tupoksi dari masing-masing tim yang bertugas dilapangan. Langkah-langkah lain yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait

dalam rangka memaksimalkan pengurangan resiko bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

3. Reformasi Kelembagaan

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Salah satu langkah yang ditempuh BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan kapasitas terhadap pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo secara khusus dan Kabupaten Luwu Timur secara umum adalah dengan memperkuat struktur kerja dengan menambahkan unit-unit yang berfokus mengurus secara detail kegiatan-kegiatan pengurangan resiko kebencanaan termasuk dengan melengkapi sekretariat dengan alat pemantau cuaca sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan di kondisi cuaca tertentu.

“Luwu Timur memang merupakan daerah dengan potensi bencana yang bervariasi, guna meningkatkan kewaspadaan terkait upaya pengurangan resiko bencana pihak kami telah dilengkapi dengan alat-alat teknologi seperti pendeteksi cuaca, pendeteksi gempa, serta sarana dan prasarana lain yang memang urgen dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana. Dengan bantuan alat tersebut memudahkan operasional kerja dari setiap anggota untuk mendapatkan informasi

yang akurat dan segera memberikan peringatan kepada masyarakat agar senantiasa waspada.” (Wawancara dengan RT 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat pemanfaatan teknologi modern merupakan penguatan kelembagaan untuk memudahkan BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan kegiatan pengelolaan kebencanaan yang juga didukung dengan peta tematik daerah yang rawan terjadi bencana seperti desa Maliwowo.

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Paradigma penanggulangan bencana di Luwu Timur masih bersifat tanggap darurat sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Untuk itu perlu diubah cara pandang penanggulangan bencana yang pro-aktif, bersifat preventif dalam kerangka pengurangan resiko bencana sehingga bisa terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.

“Untuk reformasi kelembagaan sendiri kita mencoba untuk mengubah cara pandang yang tadinya hanya sibuk pada saat bencana tapi sekarang bagaimana meminimalisir sekecil mungkin resiko atau dampak dari suatu bencana. Untuk saat ini identifikasi resiko bencana yang dilakukan baru sekedar pemetaan daerah atau kawasan yang rawan bencana. Kedepan kami berupaya mensinergikan antara aspek penanggulangan bencana serta rencana pembangunan sebagai wujud reformasi dalam kelembagaan.” (Wawancara dengan AR 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi ada perubahan paradigma yang dilakukan oleh BPBD Luwu Timur sehingga upaya penanggulangan bencana dapat sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa program pengelolaan pada kawasan lindung yang diarahkan dalam RTRW Kab. Luwu Timur 2005 - 2029 yang sejalan dengan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk reformasi birokrasi dengan pendekatan kerjasama antar SKPD antara lain (BPBD Luwu Timur):

- 1) Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung.
- 2) Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung.
- 3) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok.
- 4) Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan.

- 5) Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan.
 - 6) Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan.
 - 7) Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai.
 - 8) Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai.
 - 9) Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.
 - 10) Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau.
- Beberapa pihak yang selama ini memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah (Sumber: BPBD Luwu Timur):

- 1) PT. Vale Indonesia Tbk.
- 2) SAR Malili
- 3) PMI Kabupaten Luwu Timur
- 4) Manggala Agni (Brigade Pemadam Kebakaran Hutan Malili)
- 5) Pramuka

6) Tagana

7) Relawan Penanggulangan Bencana

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Selain dari pada penguatan teknologi salah satu reformasi kelembagaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu penguatan dan keterbukaan informasi melalui media-media sosial yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat dimana informasi tersebut dapat menjadi acuan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan terhindar dari isu-isu hoax yang sering terjadi.

“Penguatan informasi kepada masyarakat sekarang juga intens kami lakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan kedepan kami juga akan membentuk aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Disana nantinya tersedia informasi daerah-daerah yang rawan terjadi bencana seperti tanah longsor di desa Maliwowo. Ini semua guna sebagai informasi dan juga peringatan bagi masyarakat agar senantiasa waspada dalam rangka pengurangan resiko bencana. Informasi tersebut juga sebagai data akurat yang dapat menepis isu-isu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dimana dapat membuat masyarakat menjadi was-was.” (Wawancara dengan WD 18/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan salah satu upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan pendekatan media sosial sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai serta akibat perubahan iklim global telah mengakibatkan bertambahnya wilayah yang rawan terhadap bencana alam berupa bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, kebakaran hutan dan lahan.

Kesuksesan kegiatan pengurangan resiko bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona tentu perlu melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan, salah satunya ketersediaan peta kerawanan bencana yang harus di ketahui oleh pemerintah kecamatan sehingga dalam rangka pembuatan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan benar-benar dapat di pertimbangkan agar potensi bencana alam seperti tanah longsor dapat di minimalisir.

“Upaya pengurangan resiko bencana memang menjadi tugas dari pemangku kepentingan, di kantor camat Angkona sendiri itu sudah tersedia struktur geografis kewilayahan dan daerah-daerah yang rawan terjadi bencana longsor, informasi tersebut menjadi acuan pemerintah dalam membuat regulasi terlebih yang berkenaan dengan pembangunan tentu harus sesuai dengan keseimbangan alam. Karena terkadang pembangunan dan pembukaan lahan menjadi ancaman bencana sendiri seperti tanah longsor.” (Wawancara dengan KR 19/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pendirian bangunan dan pembukaan lahan pemerintah kecamatan benar-benar telah membuat regulasi dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik. Langkah tersebut di tempuh guna mengurangi resiko bencana tanah longsor di beberapa wilayah di Kecamatan Angkona.

Pembangunan infrastruktur tentu sangat diperlukan untuk mempercepat putaran roda ekonomi. Namun, pembangunan tersebut seyogyanya harus memperhatikan potensi bencana yang ada, meningkatnya pertumbuhan tanpa adanya manajemen risiko dan semakin bertambah tuanya aset tersebut merupakan penyebab utama meningkatnya kerusakan pada saat bencana.

Bencana tanah longsor yang menjadi ancaman serius di Desa Maliwowo menjadikan pemerintah desa benar-benar menerapkan aturan ketat dalam proses pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan juga fokus kepada pembangunan infrastruktur guna mengurangi dampak dari resiko bencana tanah longsor.

"Untuk langkah yang pihak kami tempuh sebagai pengambil kebijakan di Desa Maliwowo kini berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pengurangan resiko bencana terutama daerah aliran air hujan serta resapan. Selain itu pihak kami telah bekerjasama dengan pertanahan untuk meneliti struktur tanah di desa Maliwowo, sebagai informasi bagi pemerintah desa agar tidak melakukan pembangunan di atas permukiman tanah yang berpotensi longsor." (Wawancara dengan AD 20/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa juga turut melakukan reformasi kelembagaan terkait pengurangan resiko bencana dengan berfokus kepada pembangunan

infrastruktur dan mempelajari unsur geologis tanah agar masyarakat tidak sembarangan melakukan pembangunan di kawasan tersebut.

Perilaku untuk mau belajar dan mampu mengenali tanda-tanda sebelum terjadinya bencana, pencegahan dan tahu apa yang harus dilakukan, serta bagaimana mengurangi resiko bencana yang dimaksud dengan perilaku tanggap bencana. Apabila setiap orang sudah menyadari akan resiko bencana dan berperilaku tanggap bencana tentunya resiko sebuah bencana akan berkurang.

Dampak dari regulasi yang mengarah terhadap perlindungan kawasan lingkungan yang rawan terjadi bencana longsor membuat beberapa masyarakat terpaksa berhenti menggarap beberapa lahan perkebunan yang sudah terlanjur dilakukan di daerah yang masuk kategori rawan longsor. Dengan demikian beberapa masyarakat mendapatkan kompensasi dan perpindahan kawasan perkebunan yang aksesnya lebih jauh dari sebelumnya.

“Terjadinya bencana longsor di Desa Maliwowo diakibatkan dari beberapa lahan perkebunan warga yang berada di kawasan yang rawan longsor tersebut, sehingga membuat resapan air menjadi berkurang ketika musim penghujan akibat perubahan lahan hutan menjadi perkebunan. Hal tersebut membuat masyarakat berhenti melakukan kegiatan pertanian dan ada yang memilih pindah tentu dengan arahan pemerintah desa serta kompensasi dari pemerintah daerah. Tentu masyarakat harus menerima kebijakan tersebut karena arahan itu sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat desa Maliwowo juga dari ancaman bencana tanah Longsor.” (Wawancara dengan FH 20/10/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di atas pemukiman tanah yang

rawan longsor harus berhenti melaksanakan kegiatan perkebunan dan ada juga yang memilih pindah sebagai bentuk kerjasama masyarakat dalam mengurangi resiko bencana tanah Longsor di Desa Maliwowo.

Sebagai hasil observasi penulis lapangan terkait reformasi kelembagaan terkait upaya Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan menekankan kepada pemanfaatan teknologi berbasis satelit yang dapat menyediakan informasi terkait kondisi cuaca dan pergerakan tanah di Kabupaten Luwu Timur. Informasi tersebut juga di sebarluaskan oleh BPBD kepada masyarakat melalui media sosial yang dapat dengan mudah di akses masyarakat. Penguatan juga dilakukan melalui perbaikan regulasi yang menekankan pembangunan dengan memperhatikan struktur tanah dan lingkungan fisik.

"dalam penanganan tahap selanjutnya, korban yang terdampak bencana tanah longsor akan diberikan bantuan dana kepada 16 rumah, sejumlah Rp 21.116.656/rumah untuk rumah rusak berat, sedangkan ada 13 rumah rusak ringan dengan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000/rumah, kemudian untuk korban luka berat yang berjumlah 7 Orang akan diberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000/Orang dan untuk korban luka ringan diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000/orang untuk 7 korban. Dana yang digunakan berasal dari BPBD sebesar Rp 316.866.500,- dan dari pemerintah desa sebesar Rp 198.000.000,- sehingga total dana untuk penanganan bencana sebesar Rp 514.866.500". (Hasil wawancara Bapak RT/18/10/2020).

Berikut rekonsiliasi penanganan tanah longsor Desa Maliwowo Kecamatan Angkona, sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekonsiliasi bencana Tanah Longsor Desa Maliwowo (2017)

Korban		Rumah		Anggaran	
Luka Ringan	Luka Berat/Meninggal	Rusak Ringan	Rusak Berat	BPBD	PemDes
7 Orang	7 Orang	13 KK	16 KK	Rp 316.866.500,-	Rp 198.000.000,-

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu Timur 2020

Berdasarkan tabel hasil rekonsiliasi bencana tanah longsor Desa Maliwowo dapat dijelaskan bahwa terkait penanganan dalam masa transisi pemulihan bencana, terdapat 15 orang korban yang terbagi dalam 7 orang luka ringan dan 7 orang luka berat. Kemudian ada 29 rumah rusak yang terbagi dalam 13 KK rusak ringan dan 16 KK rusak berat. Jumlah bantuan yang diberikan kepada korban bencana luka ringan sebesar Rp.5.000.000/orang, untuk 7 korban dana yang digunakan sebesar $7 \times 5.000.000 = \text{Rp } 35.000.000,-$ dan untuk korban luka berat mendapatkan bantuan Rp 10.000.000/orang dan untuk 7 orang, maka dana yang digunakan yaitu $7 \times 10.000.000 = \text{Rp } 70.000.000,-$.

Kemudian untuk bantuan rumah rusak berat sejumlah Rp $21.116.656 \times 16$ rumah = Rp 337.866.496,- dan untuk rumah rusak ringan sejumlah Rp 5.000.000 x 13 rumah = Rp 65.000.000. Anggaran yang digunakan dalam proses pemulihan dan bantuan para korban bencana yang digunakan berasal dari BPBD sebesar Rp 316.866.500 dan dari pemerintah desa sejumlah Rp. 198.000.000,- jika ditotalkan maka jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp 514.866.500,-.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur di uraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua acara yaitu dari segi Kuantitas dan Kualitas. Dari segi kuantitas yaitu dilakukan penambahan anggota TRC, sedangkan dari segi kualitas yaitu melakukan pendidikan dasar seperti workshop dan seminar, dan melakukan pelatihan seperti tata cara penyelamatan korban di air, gunung dan di hutan.
2. Penguatan organisasi adalah sistem kerja yang diterapkan yaitu satu komando, bekerjasama dengan dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Damkar, organisasi kepemudaan seperti SAR Malili, OPAP, Batara Rescue, dan pihak swasta yaitu PT Vale. Serta meningkatkan insentif kerja para tenaga lapangan BPBD.
3. Reformasi kelembagaan adalah BPBD Kabupaten Luwu Timur menekankan kegiatan organisasi berbasis pendekatan teknologi modern dan informasi yang dapat diakses masyarakat juga sebagai langkah penentuan regulasi dari para pemangku kepentingan di desa Maliwowo Kecamatan Angkona. Dan mengubah paradigma yang

tadinya berfokus pada saat terjadi bencana tapi sekarang difokuskan bagaimana upaya dalam meminimalisir sekecil mungkin resiko atau dampak dari suatu bencana.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yaitu:

1. Bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur perlu menentukan jalur dan tempat evakuasi, mitigasi struktural dan mitigasi non struktural serta adaptasi masyarakat. Mitigasi struktural dengan pembangunan yang bersifat fisik sedangkan mitigasi non struktural terhadap bencana tanah longsor dilakukan dengan membuat aturan/regulasi.
2. Bagi pemerintah Kecamatan dan Desa perlu melakukan pembentukan organisasi penanggulangan bencana di tingkat desa maupun forum-forum yang aktif membahas terkait bencana tanah longsor terutama di desa-desa yang sering terjadi tanah longsor.
3. Bagi masyarakat perlu melakukan adaptasi dengan agroforestri yaitu penanaman campur antara tanaman pertanian dengan pepohonan berakar dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. N. (2017). Longsor di Luwu Timur Sulsel, 7 Orang Tewas. <https://news.detik.com>. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2020).
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kaitan Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1)*. CV Pustaka Setia.
- Ariantoni, dkk. (2009). *Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan*. Jakarta: (Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2006). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal. (2010). *Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Strategi Pengarusutamaan pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Fatimah, A. S. (2018). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif (Gema Madani). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 121-243.
- Haryanto. (2014). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- Ismar, I. (2018). Upaya Tanggap Bencana, Ini Langkah Bupati Luwu Timur. <https://makassar.tribunnews.com>. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2020).
- Kusmiati, F. (2016). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang*. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Nugraha, A. L. (2013). *Penyusunan dan Penyajian Peta Online Risiko Bencana Banjir Rob Kota Semarang*. Yogyakarta: Teknik Geomatika Universitas Gajah Mada.
- Prawitno, A., & Alam, A. S. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104.
- Pucangan, I. P. W. W., & Arimbawa, W. (2020). Evaluasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sebagai Desa Tangguh Bencana di Desa Lebih, Gianyar, Bali. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 1(1), 51-64.

- Rahman, A. Z. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 24–41. Diambil dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10364/8241>
- Raja, Z. D. G., Hendarmawan, H., & Sunardi, S. (2017). Kajian Upaya Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Bencana Tanah Longsor (Desa Ndito Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.34126/jlbg.v8i2.176>
- Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 103–110.
- Sadat, A. (2016). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 1(1), 1–20. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah)*, 1(1), 2503–4685.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tamin, I. (2006). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. *orkshop Community Base Disaster Risk Management*, PBNU, 1.
- Widiati, A. (2008). Aplikasi Manajemen Risiko Bencana Alam dalam Penataan Ruang Kabupaten Nabire. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 10(1), 7–15.
- Zaidan, N. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penggulangan Bencana
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

L

A

M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

P

I

R

A

N



Wawancara dengan Bapak Rustam Ishap



Wawancara dengan Bapak



Wawancara dengan Ibu Chalijah



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Maliwowo



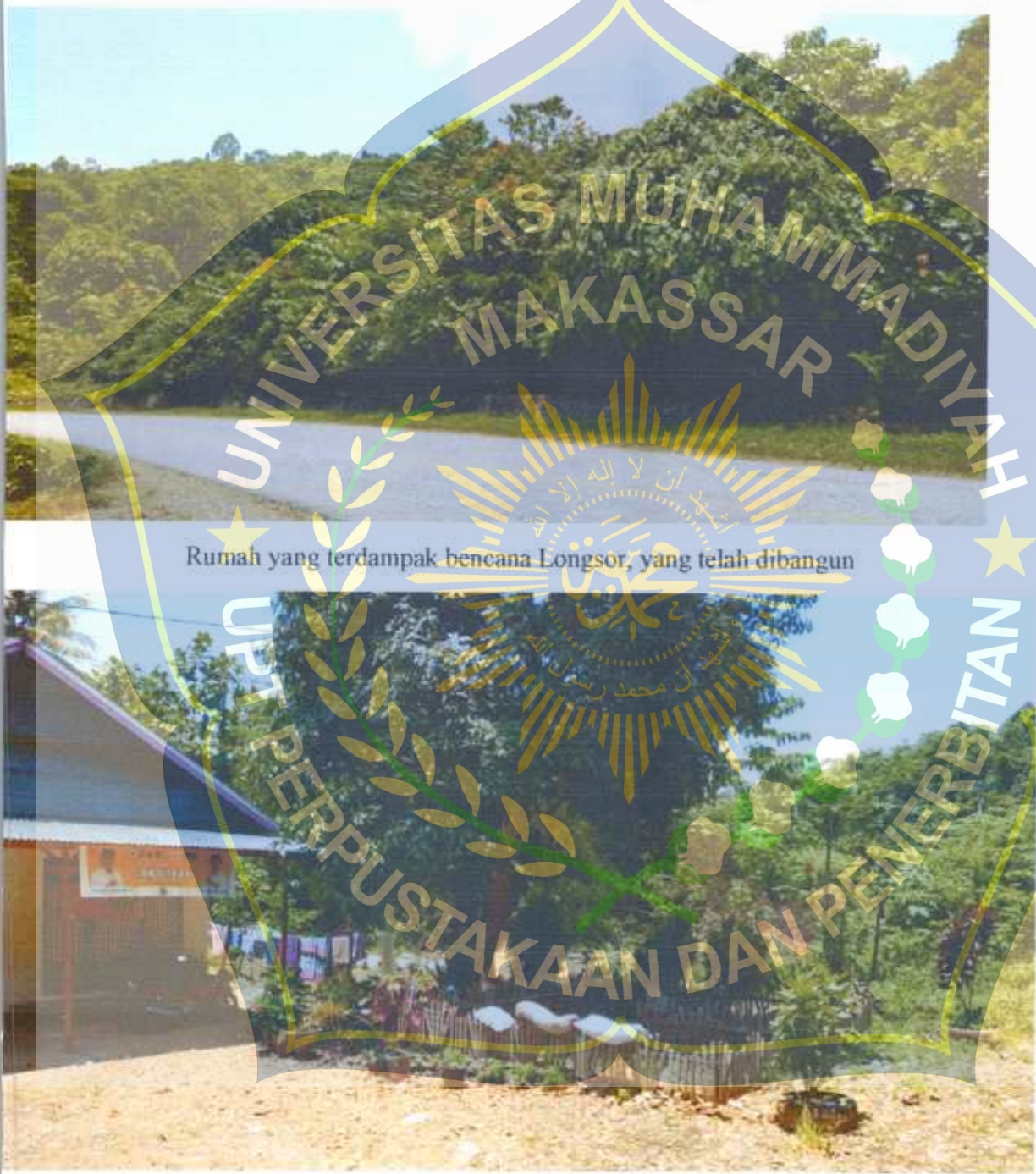
Wawancara dengan Farhan



Wawancara dengan ibu Yulianti



Lahan Reboisasi setelah bencana Longsor



Rumah yang terdampak bencana Longsor, yang telah dibangun



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0221/FSP/A.5-VI/II/1441/2020

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Nurul Ulfa Dilla
Stambuk : 105641108216
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Desa Maliwoko Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur"

Pembimbing I : Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II : Handam, S.IP., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 08 Februari 2019

Dekan,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa
5. Arsip

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Faks. (0411) 8655588 Makassar 90221 E-mail: lp3muhammadiah@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

por : 1198/05/C.4-VIII/VIII/41/2020

p : I (satu) Rangkap Proposal

Permohonan Izin Penelitian

07 Muharram 1442 H

26 August 2020 M

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Luwu Timur

Cq. Ka. Badan Kesbang. Politik & Linmas
di -

Luwu Timur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor. 897/TS/PA.1-VIII/VIII/42/2020 tanggal 26 Agustus 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL ULFA DILLA**

No. Stambuk : **10564 1108216**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus 2020 s/d 29 Oktober 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NPM 1017716



12020193005744

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5360/S.01/PTSP/2020
Inspirasi :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur

di-
Tempat

Dasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1198/05/C.4-VIII/VIII/41/2020 tanggal 26 Agustus
Diperihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL ULFA DILLA**
Nomor Pokok : 105641108216
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Ditaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI
DESA MALIWOWO KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 September s/d 01 November 2020**

Hubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Salinan Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Salinan Yth
Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
tertinggal.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Ulfa Dilla
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	15%	15 %
2	Bab 2	3%	25 %
3	Bab 3	11%	15 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 8 Februari 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartanan, S.IP., M.IP
NBM. 137 4895

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 103 1102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Ulfa Dilla, lahir di Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda pada tanggal 12 Desember 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Ishak Jaya dan Denny Alang. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK. Al-Mu Minun di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya SD 258 Sinongko Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMPN 1 Towuti dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya SMA YPS Sorowako dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”**.